

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN (Studi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling)

Oleh

YUYUN DWI LESTARI

Permasalahan penelitian muncul dari ketidaksesuaian antara hasil evaluasi dan pemilihan kelurahan untuk mewakili lomba tingkat provinsi. Kelurahan Sumberrejo Sejahtera hanya menempati peringkat ke-62 dari seluruh kelurahan di Kota Bandar Lampung, Kelurahan Sumberrejo Sejahtera terpilih sebagai perwakilan, sedangkan kelurahan lain dengan skor lebih tinggi tidak dipilih. Hal ini menimbulkan dugaan kurangnya transparansi dan objektivitas dalam proses evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (dalam Subarsono 2011 dan Pramono 2020), yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan telah didukung komunikasi yang baik. Dinas PMK menyampaikan informasi melalui sosialisasi, pelatihan, dan media digital. Arahannya bersifat jelas dan konsisten, mempermudah pemahaman pelaksana terhadap indikator EPDESKEK. Sumber Daya di kelurahan memiliki kompetensi yang cukup, terbukti mampu mengoperasikan sistem EPDESKEK. Fasilitas seperti jaringan internet dan perangkat lunak juga mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Pada bagian disposisi atau sikap pelaksana masih ditemukan celah dalam integritas dan transparansi data. Pemilihan kelurahan unggulan tidak sejalan dengan hasil evaluasi, menunjukkan lemahnya akuntabilitas pengambil kebijakan. Kemudian pada struktur birokrasi, SOP telah diterapkan dengan pembagian tugas yang jelas. Kelemahan masih terdapat pada koordinasi lintas bidang serta transparansi dalam penentuan kelurahan unggulan menunjukkan perlunya evaluasi yang berbasis bukti nyata dan sistem pengawasan yang ketat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; EPDESKEK; Kelurahan Sumberrejo Sejahtera

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS REGULATION NUMBER 81 OF 2015 CONCERNING VILLAGE AND SUB-DISTRICT DEVELOPMENT EVALUATION (Study of Sumberrejo Sejahtera Village, Kemiling District)

By

YUYUN DWI LESTARI

The research problem arose from the discrepancy between the evaluation results and the selection of sub-districts to represent the provincial level competition. Sumberrejo Sejahtera Sub-district was only ranked 62nd out of all sub-districts in Bandar Lampung City, Sumberrejo Sejahtera Sub-district was selected as a representative, while other sub-districts with higher scores were not selected. This raises suspicions of low transparency and objectivity in the evaluation process. This study aims to see how the implementation of the policy of the Minister of Home Affairs Regulation Number 81 of 2015 concerning the Evaluation of Village and Sub-district Development in Sumberrejo Sejahtera Sub-district, Kemiling District. This study uses a qualitative method with descriptive techniques with interview, observation, and documentation techniques. The theory used is the policy implementation theory from George C. Edwards III (in Subarsono 2011 and Pramono 2020), which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study are that policy implementation has been supported by good communication. The PMK Office conveys information through socialization, training, and digital media. The directions are clear and consistent, making it easier for implementers to understand the EPDESKEK indicators. Resources in the sub-district have sufficient competence, proven to be able to operate the EPDESKEK system. Facilities such as internet networks and software also support the smooth implementation of policies. In the disposition or attitude of the implementer, there are still gaps in data integrity and transparency. The selection of superior sub-districts is not in line with the evaluation results, indicating weak accountability of policy makers. Then in the bureaucratic structure, SOPs have been implemented with a clear division of tasks. Weaknesses still exist in cross-sector coordination and transparency in determining superior sub-districts, indicating the need for evaluations based on real evidence and a strict monitoring system.

Keywords: Policy Implementation; EPDESKEK; Sumberrejo Sejahtera Village